

Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Untuk Pengembangan Wilayah Hinterland Kota Banjarbaru

Bayu Ponco Purnawirawan^{1*}, Nasruddin¹

¹ Universitas Lambung Mangkurat

*Email Koresponden: bayu.purnawirawan87@gmail.com

Diterima: 21-11-2025

Disetujui: 25-12-2025

Publish: 25-12-2025

Abstrak Ketimpangan perkembangan wilayah perkotaan masih menjadi permasalahan utama dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya pada kota yang mengalami pertumbuhan cepat dan berperan strategis sebagai simpul regional. Kota Banjarbaru, dengan posisinya yang semakin penting dalam sistem perkotaan Kalimantan Selatan, memerlukan identifikasi pusat-pusat pertumbuhan guna mengarahkan pengembangan wilayah hinterland secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kecamatan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan serta menganalisis kekuatan interaksi antar kecamatan di Kota Banjarbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik sensus dan survei, melalui analisis skalogram, indeks sentralitas, dan model gravitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan, dan Landasan Ulin memiliki kelengkapan fasilitas dan indeks sentralitas tertinggi sehingga berperan sebagai pusat pertumbuhan utama. Kecamatan Cempaka berfungsi sebagai pusat pertumbuhan sekunder, sedangkan Kecamatan Liang Anggang berperan sebagai wilayah hinterland. Analisis gravitasi memperlihatkan interaksi spasial terkuat terjadi antar pusat pertumbuhan utama, sementara hubungan antara pusat dan hinterland menunjukkan tingkat interaksi yang bervariasi dipengaruhi oleh jarak dan jumlah penduduk. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan konektivitas dan pemerataan fasilitas untuk mendorong efek sebar pembangunan di Kota Banjarbaru.

Kata kunci: Pusat Pertumbuhan; *Hinterland*; *Interaksi Spasial*

Abstract Regional development disparities remain a major issue in regional development planning, particularly in cities that are experiencing rapid growth and play a strategic role as regional hubs. Banjarbaru City, with its increasingly important position in the urban system of South Kalimantan, needs to identify growth centers in order to direct the development of its hinterland in a more structured and sustainable manner. This study aims to identify subdistricts with the potential to become growth centers and analyze the strength of interactions between subdistricts in Banjarbaru City. The research method used is a quantitative approach with census and survey techniques, through scalogram analysis, centrality index, and gravity model. The results show that the subdistricts of North Banjarbaru, South Banjarbaru, and Landasan Ulin have the most complete facilities and the highest centrality index, thus serving as the main growth centers. The subdistrict of Cempaka functions as a secondary growth center, while the subdistrict of Liang Anggang serves as the hinterland. Gravity analysis shows that the strongest spatial interaction occurs between the main growth centers, while the relationship between the center and the hinterland shows varying levels of interaction influenced by distance and population. These findings emphasize the importance of strengthening connectivity and equal distribution of facilities to encourage the spread of development in Banjarbaru City.

Keywords: *Growth Center; Hinterland; Spatial Interaction*

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan wilayah yang berlangsung tidak merata dan tidak berorientasi pada keberlanjutan telah memunculkan berbagai persoalan, baik dalam dimensi ekonomi maupun sosial. Kondisi ini mendorong terjadinya kesenjangan antarwilayah, yang merupakan fenomena umum di banyak daerah, khususnya di negara berkembang. Ketidakseimbangan tersebut muncul ketika sebagian wilayah berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah lainnya, sehingga akses terhadap sumber daya, peluang ekonomi, dan kesejahteraan tidak terdistribusi secara merata (Sirojuzilam, 2011 dalam Daryanto, 2018). Menurut Hirschman (1958), perbedaan tingkat pertumbuhan yang tajam antara wilayah maju dan wilayah tertinggal dapat memicu pemusatan aktivitas ekonomi pada wilayah

tertentu. Proses ini menyebabkan daerah yang lebih berkembang semakin menguat posisinya dalam sistem pembangunan, sementara wilayah lain cenderung tertinggal. Dampak dari pola tersebut adalah munculnya efek pengkutuban pembangunan, di mana keuntungan ekonomi terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan dan sulit menyebar ke wilayah sekitarnya (*polarization effects*) (Daryanto 2018)..

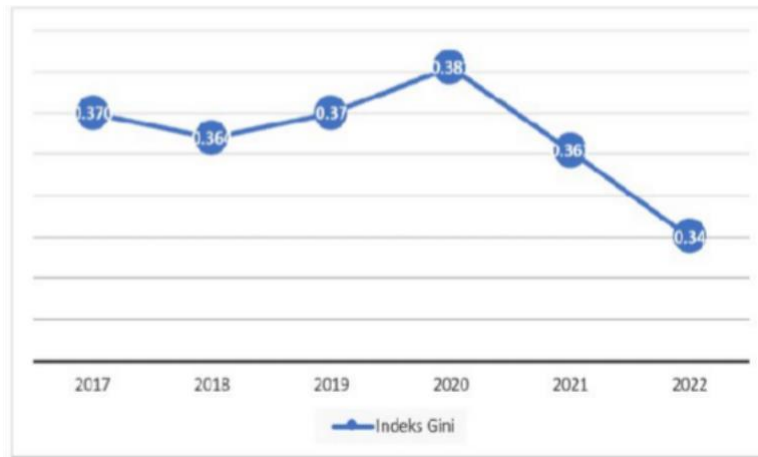
Kota Banjarbaru di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu kota yang memiliki keterkaitan fungsional dan spasial dengan kawasan Ibu Kota Nusantara. Posisi geografisnya yang strategis di bagian selatan Pulau Kalimantan, serta didukung oleh jaringan jalan nasional dan akses transportasi udara, menjadikan Banjarbaru berpotensi berperan sebagai kota penyangga sekaligus simpul pertumbuhan sekunder bagi aktivitas IKN. Peran tersebut menuntut kesiapan struktur wilayah agar mampu mengelola dorongan pertumbuhan baru secara terencana dan berkelanjutan. Apabila tidak diimbangi dengan pengendalian ruang yang memadai, perkembangan kota berisiko berlangsung tidak seimbang dan memicu ketimpangan antar kecamatan. Oleh karena itu, identifikasi pusat pertumbuhan menjadi langkah penting untuk membantu pemerintah daerah dalam menetapkan hirarki pelayanan wilayah serta mengarahkan pola interaksi antar kecamatan secara lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola berbagai tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pendelegasian kewenangan tersebut bertujuan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mempercepat pembangunan daerah adalah dengan menetapkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Melalui penetapan tersebut, pemerintah dapat memusatkan pengembangan pada wilayah tertentu yang memiliki potensi lebih besar, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih terarah. Diharapkan, wilayah yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan mampu mendorong perkembangan kawasan sekitarnya atau wilayah hinterland melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan pelayanan. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Hirschman yang menekankan pentingnya pembentukan pusat-pusat pertumbuhan sebagai sarana untuk menghasilkan efek sebar pembangunan yang lebih luas dan merata.

Penetapan pusat pertumbuhan berperan sebagai motor penggerak pembangunan yang dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Pengarahan aktivitas ekonomi pada wilayah yang memiliki potensi serta kelengkapan fasilitas akan mempercepat proses kemajuan, karena perkembangan daerah tersebut mampu menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Secara tidak langsung, kondisi ini mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya di wilayah sendiri tanpa harus bergantung pada daerah lain (Ardila, 2012; Gulo, 2015; Nurlina & Ginting, 2018; Syahputra et al., 2020). Oleh karena itu, keberhasilan suatu wilayah dalam berkembang tidak terlepas dari ketepatan dalam menentukan lokasi pusat pertumbuhan. Kajian mengenai penetapan pusat pertumbuhan dapat dilakukan melalui disiplin geografi dengan memanfaatkan pendekatan keruangan, ekologi, dan kompleks wilayah untuk memahami pola sebaran aktivitas, keterkaitan antarwilayah, serta interaksi antara manusia dan lingkungannya secara menyeluruh.

Tingkat ketimpangan pendapatan secara umum dapat dianalisis menggunakan Indeks Gini atau Rasio Gini yang dipadukan dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Berdasarkan gambar 1 dari data Badan Pusat Statistik, nilai Indeks Gini di Kota Banjarbaru selama enam tahun terakhir menunjukkan pola yang berfluktuasi. Ketimpangan tertinggi tercatat pada tahun 2020 dengan nilai 0,381. Pada periode 2018–2019, Indeks Gini mengalami penurunan dari 0,365 menjadi 0,364, kemudian kembali menurun hingga mencapai 0,357. Setelah masa pandemi COVID-19, nilai Indeks Gini pada tahun 2021 berada pada angka 0,361 dan meningkat pada tahun 2022 hingga mencapai 0,400. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Banjarbaru belum menunjukkan kecenderungan yang stabil, karena terjadi perubahan naik dan turun dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

Laju pertumbuhan PDRB untuk menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Laju pertumbuhan PDRB di Kota Banjarbaru sejak 2017 sampai dengan 2022 juga dapat dikatakan fluktuatif.



Gambar 1. Indeks Gini Kota Banjarbaru Tahun 2017-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru

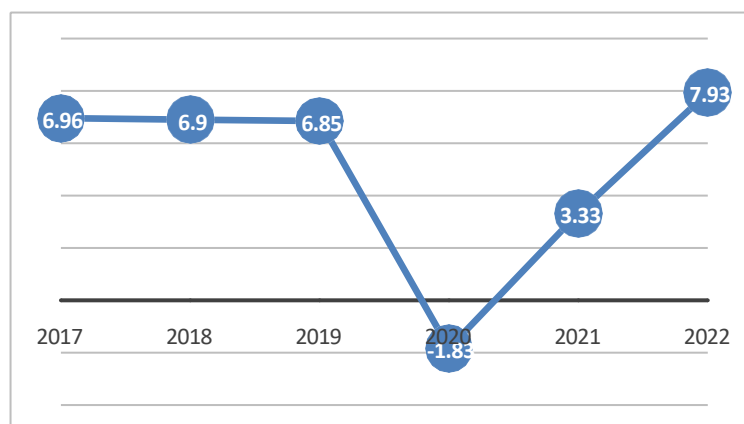
Pada periode 2017 hingga 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru menunjukkan kecenderungan menurun secara bertahap. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 6,96 persen, kemudian menurun menjadi 6,90 persen pada tahun 2018 dan kembali turun menjadi 6,85 persen pada tahun 2019. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2020, ketika laju pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi hingga mencapai -1,83 persen akibat dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi aktivitas perekonomian secara global. Pada tahun 2021, perekonomian Kota Banjarbaru mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 3,33 persen, kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2022 hingga mencapai 7,93 persen. Fluktuasi laju pertumbuhan PDRB tersebut mengindikasikan bahwa kondisi perekonomian Kota Banjarbaru belum sepenuhnya stabil, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.

Masalah yang akan dikaji pada penelitian ini, antara lain:

- 1) Kecamatan manakah yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di Kota Banjarbaru?
- 2) Daerah manakah yang memiliki interaksi kuat antar kecamatan di Kota Banjarbaru?

Tujuan dari penelitian ini, antara lain:

- 1) Mengidentifikasi kecamatan yang berpotensi menjadi pusat-pusat pertumbuhan di Kota Banjarbaru
- 2) Menganalisis interaksi kuat antar kecamatan di Kota Banjarbaru

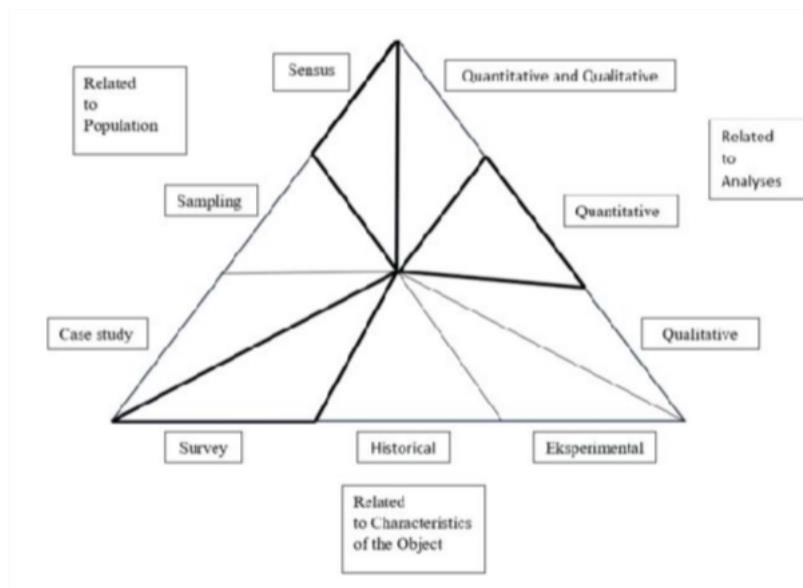


Gambar 2. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Banjarbaru Tahun 2017-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru

2. METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian akan berhubungan dengan tiga aspek utama penelitian. Pertama berkaitan dengan eksistensi populasi, kedua karakteristik objek penelitian, ketiga cara menganalisis data. Dari ketiga aspek ini, secara simultan akan menentukan karakteristik penelitian yang akan digunakan (Yunus, 2010).

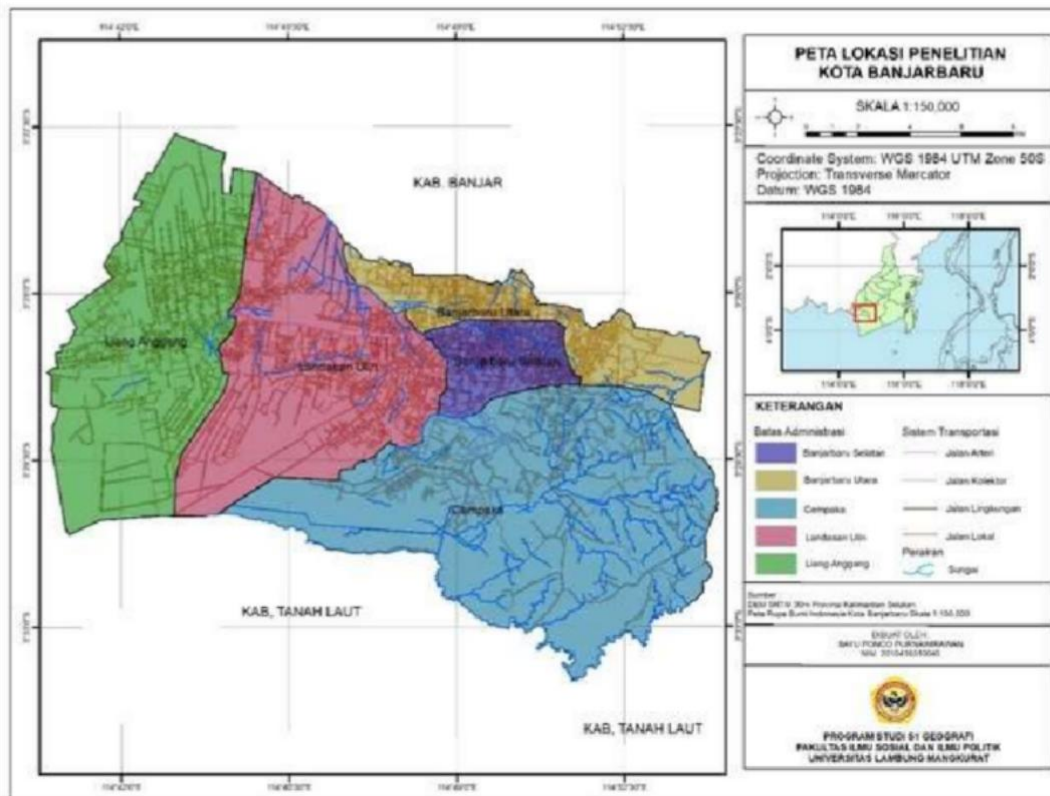


Gambar 3. Segitiga Metode Penelitian Utama

Berdasarkan keterkaitannya dengan tujuan analisis, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Ditinjau dari keberadaan dan cakupan populasi, penelitian ini menerapkan pendekatan sensus, karena seluruh anggota populasi dijadikan sebagai objek penelitian. Metode sensus dinilai paling tepat untuk menggambarkan karakteristik populasi secara menyeluruh, mengingat seluruh unit populasi dianalisis tanpa melakukan pengambilan sampel. Hal ini memungkinkan hasil penelitian merepresentasikan kondisi aktual wilayah penelitian secara lebih akurat (Yunus, 2020). Selanjutnya, berdasarkan karakteristik objek yang diteliti, pendekatan yang digunakan adalah survei, yang bertujuan untuk mengumpulkan data secara sistematis guna mendukung analisis kuantitatif yang dilakukan.

2.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan wilayah tempat dilaksanakannya suatu penelitian yang menjadi fokus kajian (Surokim, 2016). Dalam penelitian ini, perhatian utama diarahkan pada analisis penentuan pusat pertumbuhan dan wilayah hinterland di Kota Banjarbaru. Ruang lingkup penelitian mencakup identifikasi wilayah yang berpotensi berperan sebagai pusat pertumbuhan serta penentuan wilayah hinterland yang mendukung keberadaan pusat pertumbuhan tersebut. Secara administratif, Kota Banjarbaru memiliki batas wilayah di sebelah utara dengan Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar; di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut; di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar; serta di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar (Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru, 2021).



Gambar 4. Peta lokasi sampel

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang dikumpulkan melalui observasi lapangan dan terdapat beberapa data yang didapatkan dari instansi terkait di Kota Banjarbaru. Data digolongkan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data Primer dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau dapat dikatakan sebagai data yang diperoleh peneliti dari tangan pertama yang melalui observasi lapangan sekaligus dokumentasi (Sugiyono, 2012 dalam Fadruallah, 2022). Observasi dilakukan dilapangan untuk membuktikan dan mendata kondisi sarana prasarana yang tersebar di seluruh Kota Banjarbaru. Observasi ini dilakukan sekaligus memberi titik koordinat objek yang di observasi. Dokumentasi digunakan untuk memberikan gambar atau foto guna membuktikan eksistensi dari sarana prasarana yang ada di Kota Banjarbaru

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain, baik berupa dokumen, jurnal, buku, maupun hasil penelitian sebelumnya (Asra *et al.*, 2015 dalam Arisca, 2019). Pengumpulan data sekunder untuk penelitian ini dapat melalui buku maupun arsip dari pemerintah dimana untuk mendukung penelitian berdasarkan data yang valid.

2.3. Analisis Data

a) Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas

Metode skalogram berfungsi untuk menganalisis penyebaran fasilitas layanan sosial dan ekonomi di berbagai wilayah sekaligus menentukan tingkatannya. Cara kerjanya dengan membandingkan ketersediaan prasarana yang ada di setiap daerah. Dari perbandingan tersebut, wilayah-wilayah kemudian diurutkan dari yang paling lengkap hingga paling minim fasilitasnya. Logikanya sederhana: semakin banyak dan beragam prasarana yang dimiliki suatu wilayah, maka wilayah tersebut dinilai semakin maju dan berkembang dibanding yang lain. (Muta'ali, 2015).

Pengertian lainnya, Skalogram membantu menentukan wilayah mana yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan. Tingkat perkembangan suatu daerah dapat diukur dari berbagai aspek, seperti potensi sumber daya yang ada, kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia, kelengkapan infrastruktur dasar, serta keberadaan sarana dan fasilitas pendukung lain yang memungkinkan aktivitas masyarakat berkembang dengan baik. (Saruhian, 2006 dalam Irfanti, 2019)

Perhitungan kelayakan dapat dilakukan untuk mengukur keabsahan perhitungan skalogram guttman berdasarkan COR (Coefficient of reproducibility) dengan rumus:

$$COR = 1 - \frac{\Sigma e}{N \times K}$$

Keterangan:

Σe = Jumlah Error

N = Banyaknya Kecamatan

K = Total Kelengkapan Fasilitas

Catatan:

Perhitungan skalogram akan dikatakan berhasil jika jawaban dari hasil rumus COR bernilai antara 0,9 – 1.

Penentuan jumlah Orde menggunakan rumus:

$$\text{Jumlah Orde} = 1 + 3,3 \text{ Log } n$$

Keterangan:

n = jumlah kecamatan

Perhitungan Orde menggunakan rumus:

$$\text{Interval} = \frac{\text{batas atas (\%)} - \text{batas bawah (\%)}}{\text{banyaknya orde}}$$

Analisis Indeks Sentralitas merupakan tahapan lanjutan setelah penerapan analisis skalogram. Analisis ini bertujuan untuk menentukan tingkat struktur dan hierarki pusat-pusat pelayanan dalam suatu wilayah perencanaan pembangunan. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui variasi dan jumlah fungsi pelayanan, cakupan penduduk yang terlayani, serta frekuensi kemunculan masing-masing jenis fungsi pada setiap satuan wilayah permukiman. Frekuensi kemunculan fungsi mencerminkan jumlah fasilitas sejenis yang tersedia dan tersebar di suatu wilayah. Perbedaan utama antara analisis skalogram dan indeks sentralitas terletak pada penggunaan bobot terhadap setiap jenis fungsi pelayanan. Pemberian bobot tersebut memungkinkan penilaian yang lebih proporsional terhadap peran masing-masing fasilitas, sehingga metode ini dikenal sebagai indeks sentralitas terbobot. Dalam perhitungannya, indeks sentralitas Marshall dilakukan dengan memberikan bobot pada jumlah unit fasilitas yang disebut sebagai nilai sentralitas fasilitas, menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Marshall dan dikembangkan lebih lanjut oleh Muta'ali (2015).

$$C = \frac{x}{X}$$

Keterangan:

C = Bobot atribut fungsi x

x = Nilai sentralitas gabungan (100)

X = Jumlah total atribut dalam sistem

Untuk mengetahui nilai sentralitas dari tiap kecamatan berdasarkan kelengkapan dan jumlah fasilitasnya, rumus yang digunakan pada langkah ini adalah sebagai berikut:

Keterangan:

N = Nilai fasilitas di kecamatan

C = Bobot dari setiap fasilitas

Hasil analisis skalogram dan indeks sentralisasi akan menunjukkan wilayah dengan hirarki tertinggi umumnya merupakan kabupaten yang memiliki keragaman jenis fungsi atau fasilitas yang paling lengkap serta nilai indeks sentralisasi yang tinggi. Maka dari hasil perhitungan analisis gravitasi dan indeks sentralitas ini akan menentukan wilayah yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan.

b). Analisis Gravitasi

Model gravitasi adalah suatu metode kuantitatif yang digunakan untuk mengukur kekuatan interaksi antar wilayah. Kekuatan interaksi tersebut dipengaruhi dua faktor yaitu ukuran dan jarak antar wilayah. Dalam konteks sistem perkotaan, model gravitasi dapat digunakan untuk mengukur kekuatan keterkaitan antara pusat dan hinterland, serta menentukan kekuatan daya tarik dari setiap pusat kegiatan ekonomi terhadap wilayah lainnya (Blakely, 1994 dalam Muta'Ali, 2015).

Menurut Muta'ali (2015), rumus model gravitasi secara umum yaitu sebagai berikut:

$$I_{12} = G \frac{M_1 M_2}{J_{12}^b}$$

Keterangan:

I_{12} = Interaksi Wilayah

M_1 = Massa Wilayah 1

M_2 = Massa Wilayah 2

J_{12} = Jarak antara wilayah 1 dan wilayah 2

b = Konstanta ($b=2$ tergantung dari nilai aksesibilitas wilayah)

G = Konstanta Proporsional ($G=1$ tergantung pada kualitas bobot variabel)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas

Metode skalogram digunakan untuk menggambarkan tingkat hubungan dan perbedaan antarwilayah berdasarkan ketersediaan fasilitas pelayanan. Semakin banyak dan beragam fasilitas yang dimiliki suatu wilayah, maka semakin tinggi pula posisi atau hierarki wilayah tersebut dalam struktur ruang. Hasil analisis Skalogram dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Hasil Akhir Skalogram Guttman dan Pembagian Orde Per Kecamatan

Kecamatan	Fasilitas																		JF	Eror	K F %	Ordo	
	F 1	F 4	F 5	F 6	F 8	F 9	F 10	F 11	F 16	F 17	F 7	F 18	F 2	F 12	F 13	F 3	F 14	F 15					F 19
Landasan Ulin	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	15	2	79	I
Banjarbaru Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	16	0	84	I
Liang Anggang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	58	III
Banjarbaru Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	16	3	84	I
Cempaka	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	13	2	68	II
TF	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3	2	2	1	1	1				

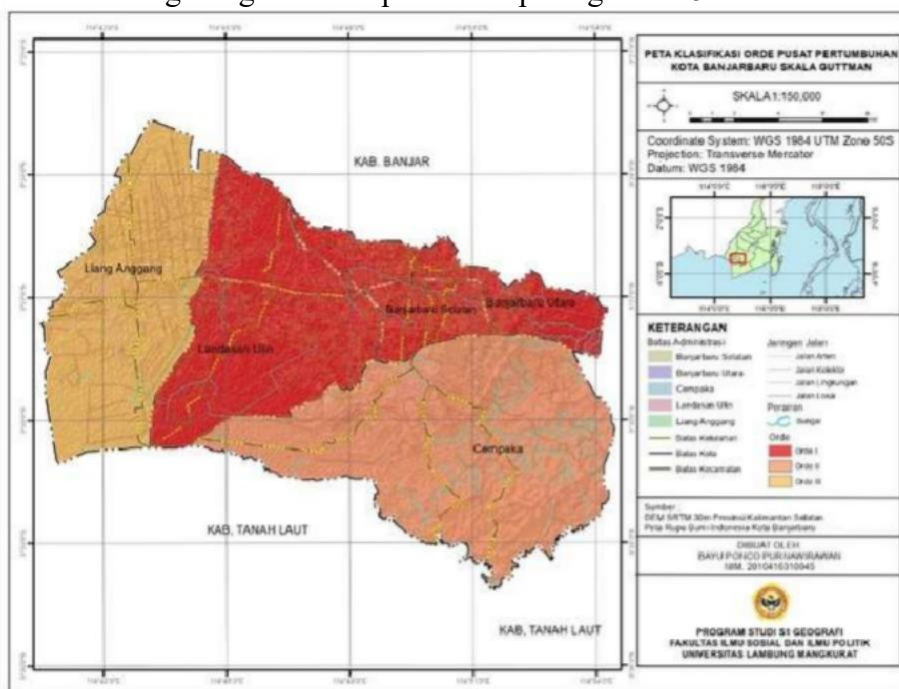
Sumber: Hasil Olah Data, 2025.

Berdasarkan analisis kelengkapan fasilitas, Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kecamatan Banjarbaru Selatan menunjukkan kondisi paling unggul dengan memiliki 16 unit fasilitas lengkap. Tingkat kelengkapan fungsi kedua kecamatan ini mencapai 84%, yang secara otomatis menempatkan

keduanya di peringkat pertama dalam hal ketersediaan fasilitas. Posisi ketiga ditempati oleh Kecamatan Landasan Ulin dengan jumlah fasilitas yang sedikit lebih sedikit, yakni 15 unit per kecamatan.

Sementara itu, Kecamatan Cempaka berada pada urutan keempat dengan total kelengkapan fasilitas mencapai 13 unit. Posisi paling bawah ditempati Kecamatan Liang Anggang yang saat ini tercatat memiliki fasilitas paling minim, yaitu hanya 11 unit. Selisih antara Liang Anggang dengan Cempaka yang berada satu tingkat di atasnya adalah 2 poin.

Jika dilihat dari aspek kesalahan data, hasil analisis pada tabel 1 menunjukkan adanya 9 eror yang tersebar di beberapa kecamatan. Distribusinya cukup bervariasi: Kecamatan Banjarbaru Selatan mencatat eror terbanyak dengan 3 kesalahan, disusul Kecamatan Landasan Ulin dan Banjarbaru Utara yang masing-masing memiliki 2 eror, sedangkan Kecamatan Cempaka dan Liang Anggang masing-masing tercatat memiliki 1 eror. Peta klasifikasi orde pusat pertumbuhan Kota Banjarbaru menggunakan analisis skalogram guttman dapat dilihat pada gambar 5 dibawah ini.



Gambar 5. Peta Klasifikasi Orde Pusat Pertumbuhan Kota Banjarbaru

Gambar 5 memperlihatkan bahwa pusat-pusat pertumbuhan di Kota Banjarbaru tersusun dalam struktur spasial berjenjang yang ditentukan oleh kelengkapan fasilitas dan besaran jumlah penduduk. Struktur hierarki ini menghasilkan tiga tingkatan pusat pertumbuhan, yakni Orde I sebagai pusat utama, Orde II sebagai pusat sekunder, dan Orde III sebagai pusat tersier.

Kecamatan yang termasuk dalam kategori Orde I meliputi Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, dan Kecamatan Banjarbaru Selatan. Kecamatan Banjarbaru Utara memiliki fungsi strategis sebagai pusat administrasi dan pemerintahan, yang tercermin dari kelengkapan fasilitas publik seperti perkantoran, sarana pendidikan, serta berbagai layanan umum lainnya. Di sisi lain, Kecamatan Banjarbaru Selatan yang terletak di bagian timur Landasan Ulin menunjukkan pemerataan fasilitas yang baik, dengan kelengkapan fasilitas tertinggi dan didukung oleh jumlah penduduk yang signifikan, sehingga membentuk simpul pelayanan perkotaan yang kuat. Ketiga kecamatan ini membentuk klaster pusat pertumbuhan utama yang saling terhubung melalui jaringan jalan arteri dan kolektor. Berdasarkan teori pusat pertumbuhan yang diperkenalkan Perroux tahun 1955, wilayah yang memiliki kelengkapan fasilitas dan dominasi jumlah penduduk akan berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, yang mampu menarik aliran barang, jasa, dan mobilitas penduduk dari wilayah-wilayah di sekitarnya. Dengan demikian, wilayah Orde I di Kota Banjarbaru berfungsi sebagai inti dari pembangunan kota yang mendorong perkembangan wilayah hinterland di sekitarnya.

Kecamatan Cempaka masuk dalam kategori pusat pertumbuhan Orde II dan berfungsi sebagai pusat pelayanan menengah yang mendukung kecamatan-kecamatan inti di Orde I. Secara geografis, Cempaka berada di bagian selatan Kota Banjarbaru dan terhubung dengan Banjarbaru Selatan melalui

jaringan jalan kolektor. Kecamatan ini memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, meskipun tidak selengkap yang dimiliki kecamatan-kecamatan Orde I. Dalam kerangka teori pusat pertumbuhan, wilayah seperti ini dikategorikan sebagai secondary growth center, yang memiliki potensi berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru apabila terjadi peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan perbaikan konektivitas wilayah.

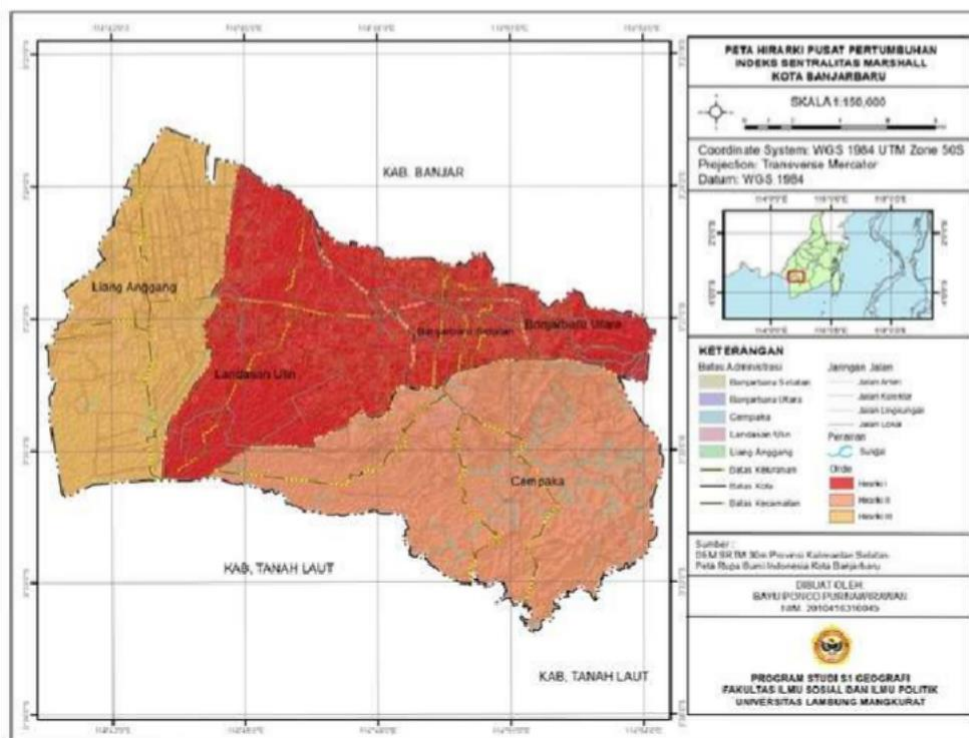
Kecamatan Liang Anggang hanya memiliki 11 unit fasilitas dengan tingkat kelengkapan mencapai 61%. Keterbatasan fasilitas ini menyebabkan Liang Anggang sangat bergantung pada kecamatan-kecamatan Orde I dalam memenuhi kebutuhan penduduknya. Meski demikian, secara strategis wilayah ini dilintasi jaringan jalan arteri yang menghubungkannya dengan Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, sehingga berpotensi berkembang menjadi sub-urban growth area di masa mendatang. Dalam perspektif teori pusat pertumbuhan, Liang Anggang berperan sebagai wilayah hinterland, yaitu wilayah yang menerima dampak pertumbuhan melalui *trickle-down effect* atau proses penyebaran manfaat pertumbuhan ekonomi dari pusat ke daerah pinggiran, yang dalam hal ini berasal dari pusat-pusat utama di Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru Utara, dan Banjarbaru Selatan.

Sebagai kelanjutan dari analisis gravitasi, digunakan analisis indeks sentralitas marshall untuk mengidentifikasi hierarki pusat pertumbuhan dalam suatu wilayah. Analisis ini mengukur berapa banyak fungsi yang tersedia, berapa jenis fungsi yang ada, serta berapa jumlah fungsi dalam wilayah tersebut. Frekuensi keberadaan fungsi menunjukkan jumlah fungsi sejenis yang tersedia dan tersebar di seluruh Kota Banjarbaru. Yang membedakan analisis skalogram dengan analisis indeks sentralitas terletak pada proses penilaian atau pembobotan terhadap setiap fungsi yang ada. Dengan adanya pembobotan ini, analisis indeks sentralitas dapat disebut sebagai indeks sentralitas terbobot, yang memberikan gambaran lebih detail tentang tingkat kepentingan masing-masing fasilitas dalam mendukung fungsi pusat pertumbuhan. Hasil perhitungan indeks sentralitas marshall dan Peta Hirarki dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 6 dibawah ini.

Tabel 2. Penentuan Bobot Fungsi Fasilitas Pelayanan

Kecamatan	Fasilitas																			IS
	F1	F4	F5	F6	F8	F9	F10	F11	F16	F17	F7	F18	F2	F12	F13	F3	F14	F15	F19	
Landasan Ulin	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	0	33.3	50	0	100	0	0	433
Banjarbaru Utara	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	33.3	33.3	50	0	0	0	100	467
Liang Anggang	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	0	0	0	0	0	0	0	0	225
Banjarbaru Selatan	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	33.3	33.3	0	50	0	100	0	467
Cempaka	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	25	33.3	0	0	50	0	0	0	308
TS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
BF	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	33.3	33.3	50	50	100	100	100	

Sumber: Hasil Olah Data, 2025



Gambar 6. Peta Hirarki Pusat Pertumbuhan menggunakan Indeks Sentralitas

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Sentralitas Marshall dan analisis pemetaan spasial, tampak bahwa pusat-pusat pertumbuhan di Kota Banjarbaru membentuk pola hierarki yang cukup jelas dan terstruktur. Hierarki yang terbentuk di Kota Banjarbaru terdiri dari tiga tingkatan, yang mengindikasikan bahwa pembangunan fasilitas pelayanan dan aktivitas perkotaan tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah. Sebaliknya, fasilitas dan aktivitas tersebut terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan kapasitas dan peran yang dimiliki masing-masing wilayah dalam sistem perkotaan.

Tiga kecamatan yaitu Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan, dan Landasan Ulin mencatat indeks sentralitas tertinggi dengan nilai masing-masing 467, 467, dan 433. Ketiganya tergabung dalam kategori Hirarki I yang berfungsi sebagai pusat pelayanan utama kota. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi-fungsi pelayanan berskala kota dan regional terkonsentrasi di ketiga wilayah tersebut. Berbagai fasilitas strategis seperti layanan perdagangan berkapasitas besar, fasilitas kesehatan rujukan, institusi pendidikan menengah hingga tinggi, pusat perbankan, serta berbagai kantor administrasi dan layanan publik umumnya tersedia di wilayah Hirarki I. Secara spasial, ketiga kecamatan ini saling terhubung melalui jaringan jalan arteri dan membentuk klaster pusat yang menjadi daya tarik utama bagi kegiatan ekonomi dan mobilitas penduduk. Dalam kerangka growth pole theory, ketiga titik ini berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan yang mengumpulkan berbagai sumber daya dan investasi, sehingga memicu aktivitas ekonomi yang terpusat dan dinamis.

Kecamatan Cempaka berada pada posisi Hirarki II dengan indeks sentralitas menengah sebesar 308. Peran Kecamatan Cempaka bersifat mendukung, di mana kecamatan ini melayani kebutuhan tingkat menengah dan dasar bagi populasi lokal sekaligus berfungsi sebagai kawasan transisi antara pusat kota dengan wilayah pinggiran. Dari segi fungsi peruntukan, Cempaka idealnya diarahkan untuk memperkuat pelayanan tingkat kecamatan, seperti keberadaan pasar tradisional atau modern berskala menengah, fasilitas pendidikan dasar hingga menengah, serta pelayanan kesehatan primer. Selain itu, wilayah ini juga potensial untuk pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal seperti agroindustri skala kecil dan pariwisata pedesaan. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa di Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, sudah terdapat kawasan perkantoran berskala provinsi. Tidak hanya itu, kecamatan ini juga diperuntukkan sebagai kawasan hijau yang ditandai dengan keberadaan beberapa hutan kota yang berfungsi sebagai penyangga ekologis.

Kecamatan Liang Anggang dengan Indeks Sentralitas terendah yaitu 225, jelas menempati kategori Hirarki III dan berfungsi sebagai wilayah hinterland atau sub-urban fringe. Secara spasial, Liang Anggang terletak di pinggiran administratif kota dan saat ini hanya menyediakan layanan-

layanan dasar bagi masyarakatnya. Fungsi wilayah ini pada saat ini lebih mengarah pada kawasan permukiman, ruang penyangga ekologis, serta aktivitas mata pencaharian lokal yang berskala kecil. Namun demikian, karena posisinya yang strategis sebagai pintu masuk dan koridor lintas antarwilayah, Liang Anggang memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi sub-urban growth area di masa depan, terutama jika didukung oleh pembangunan infrastruktur memadai dan kebijakan pemanfaatan ruang yang tepat. *Teori trickle-down* dalam konteks pusat pertumbuhan menyatakan bahwa manfaat dari pusat-pusat pertumbuhan yang kuat akan "menetes" atau tersebar ke area-area seperti Liang Anggang. Namun, pengalaman empiris di berbagai wilayah sering menunjukkan bahwa efek penyebaran ini tidak terjadi secara otomatis dan merata tanpa adanya intervensi perencanaan pembangunan yang terstruktur dan terarah.

3.2 Hasil Analisis Grvitasi

Metode analisis model gravitasi memiliki beberapa fungsi penting dalam kajian wilayah. Pertama, metode ini digunakan untuk mengukur kekuatan tingkat keterkaitan antarwilayah dengan melihat potensi interaksi yang dimiliki setiap daerah. Kedua, metode ini berguna untuk mengidentifikasi kedudukan atau fungsi suatu wilayah sebagai pusat aktivitas ekonomi, produksi, dan distribusi dalam sistem jaringan pelayanan, distribusi, maupun transportasi. Ketiga, model ini membantu menentukan hubungan fungsional antara wilayah pusat dan wilayah hinterland-nya, sehingga dapat menggambarkan pola keterkaitan ruang dan struktur hierarki dalam sistem kewilayahan (Muta'ali, 2015).

Dalam kerangka model gravitasi, setiap wilayah dipandang sebagai massa yang memiliki daya tarik tertentu. Interaksi yang terjadi antarwilayah dianalogikan seperti hubungan antar massa yang saling memengaruhi satu sama lain. Prinsipnya, semakin besar massa atau potensi yang dimiliki suatu wilayah, maka semakin kuat pula daya tarik yang dihasilkannya terhadap wilayah-wilayah lain di sekitarnya (Muta'ali, 2015; Sulistya, 2025). Model ini mengadopsi konsep gravitasi Newton dalam ilmu fisika, yang menjelaskan tentang adanya gaya tarik-menarik antara dua benda yang memiliki massa. Selain faktor jarak antarwilayah, tingkat interaksi juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor penarik seperti besaran jumlah penduduk, potensi perekonomian, ketersediaan sumber daya alam, kondisi lingkungan fisik, serta kelengkapan fasilitas yang tersedia di masing-masing wilayah (Muta'ali, 2015). Jumlah penduduk dan jarak antarwilayah di Kota Banjarbaru disajikan pada tabel 3 dibawah ini.

Wilayah 1	Wilayah 2	Jarak wilayah 1 ke 2 (Km)	Jumlah Penduduk		Indeks Gravitasi	Rank
			Wilayah 1	Wilayah 2		
Banjarbaru Selatan	Banjarbaru Utara	4,6	40.877	50.554	140.222.088	1
Banjarbaru Selatan	Cempaka	6	40.877	30.272	54.420.847	4
Banjarbaru Selatan	Landasan Ulin	7,5	40.877	84.078	75.267.091	3
Banjarbaru Selatan	Liang Anggang	13,4	40.877	51.869	16.056.746	8
Banjarbaru Utara	Cempaka	7,2	59.554	39.323	45.174.420	5
Banjarbaru Utara	Landasan Ulin	12	59.554	84.978	35.144.304	6
Banjarbaru Utara	Liang Anggang	18	59.554	51.869	9.533.970	9
Cempaka	Landasan Ulin	10,3	39.323	84.978	31.524.432	7
Cempaka	Liang Anggang	16,1	39.323	51.869	7.868.999	10
Landasan Ulin	Liang Anggang	6,1	84.978	51.869	118.455.358	2

Tabel 3. Hasil Analisis Gravitasi

Berdasarkan hasil perhitungan indeks gravitasi antarwilayah di Kota Banjarbaru, terlihat adanya variasi dalam kekuatan interaksi spasial yang terjadi antar kecamatan. Nilai indeks gravitasi paling tinggi tercatat pada hubungan antara Kecamatan Banjarbaru Selatan dan Banjarbaru Utara dengan nilai mencapai 140.222.088 (peringkat 1). Angka ini menunjukkan bahwa kedua wilayah tersebut memiliki tingkat keterkaitan yang sangat kuat dan saling memengaruhi secara signifikan. Keterkaitan

yang erat ini dipengaruhi oleh jarak yang relatif dekat antara keduanya, yaitu sekitar 4,6 km, serta

didukung oleh jumlah penduduk yang besar di kedua wilayah. Kombinasi faktor tersebut menyebabkan interaksi dalam berbagai aspek seperti aktivitas ekonomi, sosial, dan pergerakan penduduk berlangsung sangat intens.

Nilai gravitasi tinggi selanjutnya terjadi antara Kecamatan Landasan Ulin dan Liang Anggang dengan nilai 118.455.358 (peringkat 2), kemudian disusul oleh hubungan antara Banjarbaru Selatan dan Landasan Ulin dengan nilai 75.267.091 (peringkat 3). Kondisi ini menunjukkan bahwa Landasan Ulin memegang peran penting sebagai wilayah penghubung antara pusat pertumbuhan dengan wilayah-wilayah lain di sekitarnya, meskipun dari segi jarak tidak selalu yang paling dekat. Di sisi lain, nilai gravitasi terendah ditemukan pada hubungan antara Kecamatan Cempaka dan Liang Anggang dengan nilai hanya 7.868.999 (peringkat 10), serta antara Banjarbaru Utara dan Liang Anggang dengan nilai 9.533.970 (peringkat 9). Rendahnya nilai gravitasi pada kedua pasangan kecamatan ini mencerminkan kondisi jarak yang cukup jauh serta jumlah penduduk yang relatif lebih sedikit, sehingga intensitas hubungan dan interaksi antarwilayah pun menjadi rendah.

Temuan ini sejalan dengan teori gravitasi wilayah yang dikemukakan oleh Blakely (1994) dan diperkuat oleh Lutfi Muta'ali (2015), yang menyatakan bahwa besarnya kekuatan interaksi antarwilayah sangat dipengaruhi oleh ukuran massa wilayah seperti jumlah penduduk dan intensitas aktivitas ekonomi serta faktor jarak antarwilayah. Prinsip dasarnya adalah semakin besar jumlah penduduk dan semakin dekat jarak yang memisahkan dua wilayah, maka semakin kuat pula daya tarik dan intensitas interaksi yang terjadi di antara keduanya.

4. KESIMPULAN

Hasil perhitungan menggunakan analisis gravitasi menunjukkan bahwa Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Landasan Ulin tergabung dalam Orde I (*pusat pertumbuhan utama*). Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kecamatan Banjarbaru Selatan memiliki total Kelengkapan Fungsi (KF) mencapai 84%, sedangkan Kecamatan Landasan Ulin memiliki Kelengkapan Fungsi (KF) mencapai 79%. Kecamatan Cempaka tergabung dalam Orde II (*pusat pertumbuhan sekunder*) dengan Kelengkapan Fungsi (KF) mencapai 68%. Selanjutnya, Orde III (*pusat pertumbuhan tersier*) ditempati oleh Kecamatan Liang Anggang dengan Kelengkapan Fungsi (KF) mencapai 58%. Hasil perhitungan lanjutan menggunakan analisis indeks sentralitas menunjukkan bahwa Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Landasan Ulin masih berperan sebagai Pusat Pertumbuhan Utama (Hirarki I). Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kecamatan Banjarbaru Selatan memiliki Indeks Sentralitas (IS) tertinggi sebanyak 467 IS. Kecamatan Landasan Ulin memiliki Indeks Sentralitas (IS) tertinggi kedua yaitu sebanyak 433 IS. Pusat Pertumbuhan Sekunder (Hirarki II) ditempati oleh Kecamatan Cempaka dengan total Indeks Sentralitas (IS) sebanyak 308 IS. Sedangkan Kecamatan Liang Anggang menempati Hirarki III yang mana kecamatan ini berfungsi sebagai *Hinterland*.

Secara spasial, posisi kecamatan-kecamatan yang tergabung dalam Hirarki I saling terhubung membentuk kluster pertumbuhan inti (*core area*) di bagian tengah-barat kota. Pola ini mencerminkan keterpaduan fungsional antara pusat pemerintahan (Banjarbaru Utara dan Selatan) dengan kawasan ekonomi dan permukiman padat (Landasan Ulin). Dengan karakteristik tersebut, wilayah ini dapat dikategorikan sebagai *growth pole* sesuai konsep Perroux (1955), yakni kawasan dengan kapasitas pertumbuhan dominan yang menimbulkan pengaruh ke wilayah sekitarnya melalui efek penyebaran (*spread effect*). Sedangkan kawasan *hinterland* memperlihatkan bahwa Liang Anggang secara fungsional masih bergantung pada pusat utama. Dalam kerangka model inti-pinggiran (*core-periphery*) menurut Friedmann (1966), Liang Anggang berfungsi sebagai daerah penyokong yang menyediakan ruang dan sumber daya, namun belum menjadi pusat penggerak pertumbuhan.

Penentuan interaksi paling kuat antara wilayah *hinterland* (Kecamatan Liang Anggang) dengan pusat pertumbuhan di Kota Banjarbaru berdasarkan perhitungan menggunakan analisis gravitasi menunjukkan bahwa interaksi antara dua wilayah yang tergabung dalam Hirarki I, yaitu Kecamatan Banjarbaru Utara dengan Kecamatan Banjarbaru Selatan, menjadi interaksi paling tinggi dengan total nilai interaksi sebanyak 140.222.088. Interaksi antar kecamatan yang paling kecil adalah interaksi antara Kecamatan Cempaka (Hirarki II) dengan Kecamatan Liang Anggang (Hirarki III) dengan nilai interaksi sebanyak 7.868.999. Interaksi tertinggi untuk kawasan *hinterland* dengan pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Liang Anggang dengan Kecamatan Landasan Ulin dengan nilai

interaksi tertinggi mencapai 118.455.358. Interaksi tertinggi kedua dan ketiga antara kawasan *hinterland* dengan pusat pertumbuhan lainnya yaitu Kecamatan Liang Anggang dengan Kecamatan Banjarbaru Selatan dan Kecamatan Liang Anggang dengan Kecamatan Banjarbaru Utara dengan masing-masing nilai interaksi sebesar 16.056.746 dan 9.533.970.

Interaksi tertinggi antar pusat pertumbuhan (Hirarki I) menunjukkan bahwa kedua wilayah tersebut memiliki tingkat keterikatan yang sangat kuat. Keterkaitan ini dipengaruhi oleh jarak yang relatif dekat (4,6 km) dan jumlah penduduk yang besar pada kedua wilayah, sehingga interaksi antar aktivitas ekonomi, sosial, dan pergerakan penduduk berlangsung lebih intens. Hubungan antara kawasan *hinterland* (Kecamatan Liang Anggang) dengan pusat pertumbuhan (Landasan Ulin) sejalan dengan teori gravitasi wilayah yang dikemukakan oleh Blakely (1994) dan diperkuat oleh Lutfi Muta'ali (2015), bahwa besarnya kekuatan interaksi antarwilayah dipengaruhi oleh ukuran massa wilayah (misalnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi) serta jarak antarwilayah. Semakin besar jumlah penduduk dan semakin dekat jaraknya, maka semakin kuat pula daya tarik dan interaksi antarwilayah tersebut.

5. REFERENSI

- Ardila, R. (2012). Analysis of Development of Economic Growth Center in Banjarnegara Regency. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2), 1–9. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/482>
- Arisca, T. I. S. (2019). Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Terhadap Perkembangan Wilayah Di Kabupaten Pelalawan. *Skripsi, Pekanbaru*, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas.
- Badan Pusat Statistik Kota Banjar. (2021). Kota Banjar dalam Angka 2021. *BPS Kota Banjar*, xxxiv+214.
- Gulo, Y. (2015). Growth Center Identification and Its Supporting Area in Nias Regency Regional Development. *Widyariset*, 18(1), 37–48. <https://core.ac.uk/download/pdf/304736659.pdf>
- Imambang Eka Sulistya. (2025). Penentuan Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Analisis Interaksi Spasial Antarwilayah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 63–78. <https://doi.org/10.33005/jdep.v8i1.712>
- Irfanti, P. E. (2019). *Analisis Penentuan Pusat Pertumbuhan Dan Wilayah Hinterland Dalam Pengembangan Provinsi Jawa Timur*.
- Nurlina, N., & Ginting, A. R. B. (2018). Analisis Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Wilayah Pendukungnya dalam Pengembangan Wilayah Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 60–69. <https://doi.org/10.33059/jseb.v9i1.462>
- Surokim. (2016). Riset Komunikasi : Buku Pendamping Bimbingan Skripsi. *Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi FISIB-UTM & Aspikom Jawa Timur*, 285. <http://komunikasi.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2016/01/BUKU-RISET-KOMUNIKASI-JADI.pdf>
- Syahputra, A., Yonariza, Y., & Hasnah, H. (2020). Analisis Penentuan Pusat-pusat Pertumbuhan dan Komoditi Basis Pertanian di Kabupaten Pasaman Barat. *JOSETA: Journal of Socio-Economics on Tropical Agriculture*, 2(2), 91–96. <https://doi.org/10.25077/joseta.v2i2.231>